



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR 25 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini.

Pasal 4

Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini, Pengawas Internal Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional diberikan tugas untuk:

- a. Melakukan . . .

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini.

Pasal 4

Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini, Pengawas Internal Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional diberikan tugas untuk:

- a. Melakukan . . .

- a. Melakukan reviu atas pencapaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Pasal 6

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2020

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,



Achmad Djamaludin
ACHMAD DJAMALUDIN
LAKSAMANA MADYA TNI

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**


- Kementerian/Lembaga : Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
- Tugas : Merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.
- Fungsi : 1. Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
 2. Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan, kesatuan, kelangsungan hidup bangsa dan negara; dan
 3. Penyusunan perkiraan resiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.

Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terbinanya kondisi ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis dalam rangka mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong	Persentase rumusan kebijakan dan strategi ketahanan nasional yang disiapkan untuk bahan Sidang Dewan Ketahanan Nasional	
		Persentase rumusan saran tindak ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang ditindaklanjuti	
		Persentase rancangan kebijakan untuk mengukur pembangunan nasional yang dilaporkan	
		Persentase rancangan kebijakan untuk mengukur kondisi kehidupan nasional yang dilaporkan	
		Persentase rancangan kebijakan dan strategi aksi	

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		bela negara dalam rangka pembinaan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang dilaporkan	
2.	Terwujudnya pelayanan Wantannas yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			
Opini Badan Pemeriksa Keuangan			
Jumlah penyelenggaraan Sidang Dewan			

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,



ACHMAD DJAMALUDIN
LAKSAMANA MADYA TNI

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

KEDEPUTIAN PENGKAJIAN DAN PENGINDERAAN

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan dan strategi nasional, regional, dan internasional yang tangguh dan dinamis	Persentase rancangan kebijakan dan strategi nasional, regional, dan internasional yang disiapkan untuk bahan prasidang	
		Persentase saran tindak hasil penginderaan nasional, regional dan internasional yang dikirim ke Presiden	
		Persentase kajian kerjasama bidang lingkungan strategis yang dikirim ke Presiden	

Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Nasional

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya Kirstranas, Telstranas dan Apstranas lingkungan strategis nasional	Jumlah Kirstranas, Telstranas dan Apstranas lingkungan strategis nasional yang dihasilkan	
2.	Terumuskannya saran tindak hasil penginderaan lingkungan strategis nasional	Jumlah saran tindak penginderaan lingkungan strategis nasional yang dihasilkan	
3.	Terumuskannya kajian kerjasama bidang lingkungan strategis nasional	Jumlah kajian kerjasama bidang lingkungan strategis nasional	

Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Regional

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya Kirstranas, Telstranas dan Apstranas lingkungan strategis regional	Jumlah Kirstranas, Telstranas dan Apstranas lingkungan strategis regional yang dihasilkan	
2.	Terumuskannya saran tindak hasil penginderaan lingkungan strategis regional	Jumlah saran tindak penginderaan lingkungan strategis regional yang dihasilkan	

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
3.	Terumuskannya kajian kerjasama bidang lingkungan strategis regional	Jumlah kajian kerjasama bidang lingkungan strategis regional yang dihasilkan	

Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Internasional

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya saran kebijakan lingkungan strategis internasional	Jumlah saran kebijakan lingkungan strategis internasional yang dihasilkan	
2.	Terumuskannya saran tindak hasil penginderaan lingkungan strategis internasional	Jumlah saran tindak penginderaan lingkungan strategis internasional yang dihasilkan	
3.	Terumuskannya hasil kajian kerjasama bidang lingkungan strategis internasional	Terumuskannya hasil kajian kerjasama bidang lingkungan strategis internasional yang dihasilkan	

KEDEPUTIAN SISTEM NASIONAL

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan Kebijakan sistem nasional yang tangguh dan dinamis	Persentase rancangan kebijakan sistem nasional yang disiapkan untuk bahan prasidang	
		Persentase saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden	
		Persentase kajian kerjasama bidang sistem nasional yang dikirim ke Presiden	

Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Pemerintahan Negara

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan bidang pemerintahan negara	Jumlah rancangan kebijakan bidang pemerintahan negara yang dihasilkan	

2. Terumuskannya . . .

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terumuskannya saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional bidang pemerintahan negara	Jumlah saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan nasional bidang pemerintahan negara yang dihasilkan	
3.	Terwujudnya kajian kerjasama bidang pemerintahan negara	Jumlah kajian kerjasama bidang pemerintahan negara yang dihasilkan	

Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Alam

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan bidang lingkungan alam	Jumlah rancangan kebijakan bidang lingkungan alam yang dihasilkan	
2.	Terumuskannya saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional bidang lingkungan alam	Jumlah saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan nasional bidang lingkungan alam yang dihasilkan	
3.	Terumuskannya kajian kerjasama bidang lingkungan alam	Jumlah kajian kerjasama bidang lingkungan alam yang dihasilkan	

Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Sosial

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan bidang lingkungan sosial	Jumlah rancangan kebijakan sistem nasional bidang lingkungan sosial yang dihasilkan	
2.	Terumuskannya saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional bidang lingkungan sosial	Jumlah saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan nasional bidang lingkungan sosial yang dihasilkan	
3.	Terumuskannya kajian kerjasama bidang lingkungan sosial	Jumlah kajian kerjasama bidang lingkungan sosial yang dihasilkan	

Pembantu Deputi Urusan Informasi dan Pengolahan Data

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan bidang informasi dan pengolahan data	Jumlah rancangan kebijakan informasi dan pengolahan data yang dihasilkan	
2.	Terumuskannya saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional bidang informasi dan pengolahan data	Jumlah saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan nasional bidang informasi dan pengolahan data yang dihasilkan	
3.	Terumuskannya kajian kerjasama bidang informasi dan pengolahan data	Jumlah kajian kerjasama bidang informasi dan pengolahan data yang dihasilkan	

KEDEPUTIAN POLITIK DAN STRATEGI

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan politik, strategi nasional dan rencana kontinjensi yang tangguh dan dinamis	Persentase rancangan kebijakan politik strategi nasional dan rencana kontinjensi yang disiapkan untuk bahan prasidang	
		Persentase saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden	
		Persentase perumusan perkiraan batas toleransi risiko pembangunan yang disiapkan sebagai bahan masukan pengambilan keputusan	
		Persentase kajian kerjasama bidang politik dan strategi yang dikirim ke Presiden	

Pembantu Deputi Urusan Politik Nasional

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan bidang politik nasional	Jumlah rancangan kebijakan politik nasional yang dihasilkan	

2. Terumuskannya . . .

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terumuskannya saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan politik nasional	Jumlah saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan politik nasional yang dihasilkan	
3.	Terumuskannya kajian kerjasama bidang politik nasional	Jumlah kajian kerjasama bidang politik nasional	

Pembantu Deputi Urusan Strategi Nasional

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan bidang strategi nasional	Jumlah rancangan kebijakan bidang strategi nasional yang dihasilkan	
2.	Terumuskannya saran tindak hasil evaluasi dan batas toleransi risiko pembangunan nasional	Jumlah saran tindak hasil evaluasi dan batas toleransi risiko pembangunan nasional yang dihasilkan	
3.	Terumuskannya kajian kerjasama bidang strategi nasional	Jumlah kajian kerjasama bidang strategi nasional yang dihasilkan	

Pembantu Deputi Urusan Perencanaan Kontinjensi

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan bidang perencanaan kontinjensi	Jumlah rancangan kebijakan bidang perencanaan kontinjensi yang dihasilkan	
2.	Terumuskannya saran tindak hasil identifikasi dan klasifikasi ancaman stabilitas nasional	Jumlah saran tindak hasil identifikasi dan klasifikasi ancaman stabilitas nasional yang dihasilkan	
3.	Terumuskannya kajian kerjasama bidang perencanaan kontinjensi	Jumlah kajian kerjasama bidang perencanaan kontinjensi yang dihasilkan	

KEDEPUTIAN PENGEMBANGAN

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya hasil pengukuran pembangunan nasional dan kondisi kehidupan nasional serta kebijakan mobilisasi sumber kekuatan nasional yang tangguh dan dinamis	Persentase rancangan kebijakan mobilisasi sumber kekuatan nasional yang disiapkan untuk bahan prasidang	
Persentase saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan penyimpangan pembangunan nasional yang dikirim ke Presiden			
Persentase saran tindak hasil pengukuran kondisi kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden			
Persentase kajian kerjasama bidang pengembangan ketahanan yang dikirim ke Presiden			
Persentase rancangan kebijakan aksi bela negara untuk pembinaan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang disiapkan			

Pembantu Deputi Urusan Hukum dan Perundang-undangan

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan bidang hukum dan perundang-undangan	Jumlah rancangan kebijakan bidang hukum dan perundang-undangan yang dihasilkan	
2.	Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang hukum dan perundang-undangan	Jumlah saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang hukum dan perundang-undangan yang dihasilkan	
3.	Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang hukum dan perundang-undangan	Jumlah saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang hukum dan perundang-undangan yang dihasilkan	
4.	Terumuskannya kajian kerjasama bidang hukum dan perundang-undangan	Jumlah kajian kerjasama bidang hukum dan perundang-undangan yang dihasilkan	

Pembantu Deputi Urusan Ekonomi

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan ekonomi	Jumlah rancangan kebijakan ekonomi yang dihasilkan	
2.	Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang ekonomi	Jumlah terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang ekonomi yang dihasilkan	
3.	Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang ekonomi	Jumlah saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang ekonomi yang dihasilkan	
4.	Terumuskannya kajian kerjasama bidang ekonomi	Jumlah kajian kerjasama bidang ekonomi yang dihasilkan	

Pembantu Deputi Urusan Sosial Budaya

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan sosial budaya	Jumlah rancangan kebijakan sosial dan budaya yang dihasilkan	
2.	Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang sosial budaya	Jumlah saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang sosial budaya yang dihasilkan	
3.	Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang sosial budaya	Jumlah saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang sosial budaya yang dihasilkan	
4.	Terumuskannya kajian kerjasama aspek sosial budaya	Jumlah kajian kerjasama aspek sosial budaya yang dihasilkan	

Pembantu Deputi Urusan Pertahanan dan Keamanan

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan bidang pertahanan dan keamanan	Jumlah rancangan kebijakan mobilisasi bidang pertahanan dan keamanan yang dihasilkan	
2.	Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang pertahanan keamanan	Jumlah saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang pertahanan keamanan yang dihasilkan	
3.	Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang pertahanan keamanan	Jumlah saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang pertahanan keamanan yang dihasilkan	
4.	Terumuskannya kajian kerjasama bidang pertahanan dan keamanan	Jumlah kajian kerjasama bidang pertahanan dan keamanan yang dihasilkan	
5.	Penguatan ketahanan nasional	Jumlah rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan aksi Bela Negara	

STAF AHLI

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya Kebijakan Terkait Keahlian Tertentu yang Tangguh dan dinamis	Jumlah telaahan, saran dan pertimbangan serta rekomendasi yang dihasilkan	

BIRO PERENCANAAN, ORGANISASI DAN KEUANGAN

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terlaksananya layanan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang berkualitas	Persentase dokumen perencanaan yang dihasilkan di Setjen Wantannas	
		Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Setjen Wantannas yang terlaksana	
2.	Terlaksananya layanan organisasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian proses bisnis dan layanan penataan organisasi	

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
3.	Terlaksananya layanan keuangan yang berkualitas	Persentase penyerapan anggaran Setjen Wantannas	
		Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan	
4.	Terlaksananya layanan reformasi birokrasi	Nilai penerapan reformasi birokrasi Wantannas	

BIRO PERSIDANGAN, SISTEM INFORMASI DAN PENGAWAS INTERNAL

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terlaksananya layanan persidangan, dan kehumasan	Peringkat keterbukaan informasi publik	
		Jumlah sidang Dewan yang terlaksana	
2.	Terlaksananya layanan data dan informasi yang optimal	Keamanan Informasi (KAMI) K/L	
3.	Terlaksananya layanan pengawasan internal yang berkualitas	Nilai internal Audit Capability Model (IA-CM)	
		Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	

BIRO UMUM

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terlaksananya layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas	Persentase pelaksanaan layanan manajemen SDM yang berkualitas	
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	
2.	Terlaksananya layanan manajemen (Barang Milik Negara) BMN yang transparan dan akuntabel	Persentase pelaksanaan layanan manajemen BMN yang transparan dan akuntabel	
		Kategori kualitas pengelolaan BMN	
3.	Terlaksananya layanan protokoler yang efektif dan efisien	Persentase pelaksanaan layanan protokoler yang efektif dan efisien	
4.	Terlaksananya layanan umum	Persentase pelaksanaan layanan umum yang handal dan berkualitas	
		Indeks Hasil Pengawasan Arsip	

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
5.	Terlaksananya layanan perkantoran yang berkualitas	Persentase layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang berkualitas	
		Persentase Pembayaran Gaji Tepat Waktu	
6.	Terlaksananya Layanan Hukum yang berkualitas	Persentase pelaksanaan layanan hukum yang Handal dan berkualitas	



SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

ACHMAD DJAMALUDIN
LAKSAMANA MADYA TNI

MANUAL IKU KEMENTERIAN/LEMBAGA SEKJEN WANTANNAS

PERSPEKTIF: STAKEHOLDER

SS1: Terbinanya kondisi ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis dalam rangka mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong

Indikator Kinerja Utama	
IKU1. Persentase rumusan kebijakan dan strategi ketahanan nasional yang disiapkan untuk bahan Sidang Dewan Ketahanan Nasional	
Definisi	<p>Sidang Dewan Ketahanan Nasional merupakan forum/rapat/pertemuan tertinggi Wantannas yang bertugas melakukan pembahasan dan penetapan kebijakan nasional berkaitan dengan isu-isu keamanan nasional. Dimana pembahasan dan penetapannya dilaksanakan melalui Tahapan Uji <i>Clearing House</i> dan pelaksanaan sidang dan pasca sidang. Uji <i>clearing house</i> terdiri dari 3 tahap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Uji Materi Forum I: Dipimpin oleh Deputi, dihadiri Deputi lainnya, Kapokja, Sekretaris Pokja. Berfokus pada redaksional. Menghasilkan Naskah Kesatu (N-1). 2. Rapat Uji Materi Forum II: Menyajikan Naskah Kesatu (N-1) kepada Sesjen Wantannas untuk mendapat tanggapan. Menghasilkan Naskah Kedua (N-2). 3. Rapat Uji Materi Forum III: Menghadirkan pejabat eselon satu perwakilan Kementerian/LPNK untuk mendapat tanggapan terkait dengan substansi telaahan. Menghasilkan Naskah Ketiga (N-3).
Formula perhitungan kinerja	<p>Rumusan kebijakan dan strategi ketahanan nasional (Naskah N-3) yang akan dihasilkan Sesjen setelah uji materi forum prasidang dibagi Naskah N-2 yang di jadikan bahan uji Materi Prasidang dikalikan seratus persen</p> $PRD = \frac{\sum N-3}{\sum RN-3} \times 100 \%$ <p>PRD = Persentase rumusan kebijakan dan strategi ketahanan nasional (Naskah N-3) yang dijadikan rumusan kebijakan dan disiapkan untuk bahan Sidang Dewan Ketahanan Nasional (atas petunjuk ketua dewan)</p> <p>N-3 = Rumusan kebijakan dan strategi ketahanan nasional (Naskah N-3) yang akan dihasilkan Sesjen setelah uji materi forum prasidang</p>

	RN-3 = Naskah N-2 yang di jadikan bahan uji Materi Prasadang
Target	80
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Biro Persidangan, Sisfo, dan Pengawasan Internal
Penyedia Data	Seluruh Kedepatian
Penanggungjawab	Sesjen Wantannas

Indikator Kinerja Utama

IKU2. Persentase rumusan saran tindak ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang ditindaklanjuti

Definisi	Saran tindak yang dimaksud adalah dalam lingkup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian Kerjasama 2. Perkiraan Cepat 3. Round Table Discussion 4. Forum General Discussion 5. Telaahan Staff
Formula perhitungan kinerja	<p>Jumlah rumusan saran tindak kebijakan dan strategi nasional di Kedepatian yang dikirim ke Presiden dibagi dengan jumlah saran tindak yang dihasilkan dikali seratus persen</p> $\text{PSTP} = \frac{\sum \text{RSTS}}{\sum \text{STS}} \times 100 \%$ <p>PSTP = Persentase rumusan saran tindak ketahanan nasional yang dikirim ke presiden RSTS = Jumlah rumusan saran tindak kebijakan dan strategi nasional di Kedepatian yang dikirim ke Presiden STS = Jumlah saran tindak yang dihasilkan</p>
Target	80
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Semua Kedepatian dan Staff Ahli
Penyedia Data	Semua Kedepatian dan Staff Ahli
Penanggungjawab	Sesjen Wantannas

Indikator Kinerja Utama	
IKU3. Persentase rancangan kebijakan untuk mengukur pembangunan nasional yang dilaporkan	
Definisi	Rancangan kebijakan dilaksanakan melalui saran tindak pemantauan dan pengukuran pembangunan nasional dilaksanakan melalui saran tindak. Saran tindak yang dimaksud adalah dalam lingkup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan Cepat 2. Round Table Discussion 3. Forum General Discussion
Formula perhitungan kinerja	Jumlah rumusan saran tindak pemantauan/pengukuran pembangunan nasional yang dikirim ke Presiden dibagi dengan jumlah saran tindak pemantauan/pengukuran pembangunan nasional yang dihasilkan dikali seratus persen $\text{PSTP} = \frac{\sum \text{RSTS}}{\sum \text{STS}} \times 100 \%$ <p> PSTP = Persentase rumusan saran tindak pemantauan/pengukuran pembangunan nasional yang dikirim ke Presiden RSTP = Rumusan saran tindak pemantauan/pengukuran pembangunan nasional yang dikirim ke Presiden STS = Saran tindak pemantauan/pengukuran pembangunan nasional yang dihasilkan </p>
Target	80
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Kedeputan Sisnas, Kedeputan Polstra, Kedeputan Pengembangan
Penyedia Data	Kedeputan Sisnas, Kedeputan Polstra, Kedeputan Pengembangan
Penanggungjawab	Sesjen Wantannas

Indikator Kinerja Utama	
IKU4. Persentase rancangan kebijakan untuk mengukur kondisi kehidupan nasional yang dilaporkan	
Definisi	Rancangan kebijakan dilaksanakan melalui saran tindak pemantauan dan pengukuran kondisi kehidupan nasional. Saran tindak yang dimaksud adalah dalam lingkup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan Cepat 2. Round Table Discussion 3. Forum General Discussion

Formula perhitungan kinerja	<p>Jumlah rumusan saran tindak pemantauan/pengukuran kondisi kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden dibagi dengan jumlah saran tindak pemantauan/pengukuran kondisi kehidupan nasional yang dihasilkan dikali seratus persen</p> $\text{PSTK} = \frac{\sum \text{RSTK}}{\sum \text{STK}} \times 100 \%$ <p>PSTK = Persentase rumusan saran tindak pemantauan/pengukuran kondisi kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden RSTK = Rumusan saran tindak pemantauan/pengukuran kondisi kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden STK = Saran tindak pemantauan/pengukuran kondisi kehidupan nasional yang dihasilkan</p>
Target	80
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Kedeputan Sisnas, Kedeputan Polstra, Kedeputan Pengembangan
Penyedia Data	Kedeputan Sisnas, Kedeputan Polstra, Kedeputan Pengembangan
Penanggungjawab	Sesjen Wantannas
Keterangan lainnya	-

Indikator Kinerja Utama	
IKU5. Persentase rancangan kebijakan dan strategi aksi bela negara dalam rangka pembinaan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang dilaporkan	
Definisi	Perumusan rancangan kebijakan dan strategi aksi bela negara untuk memperkuat ketahanan nasional
Formula perhitungan kinerja	<p>Jumlah rancangan kebijakan dan strategi aksi bela negara yang dikirim ke Presiden dibagi dengan jumlah rancangan kebijakan bela negara yang dihasilkan dikali seratus persen</p> $\text{PRKBN} = \frac{\sum \text{RKBN}}{\sum \text{RBN}} \times 100 \%$ <p>PRKBN = Persentase rancangan kebijakan dan strategi aksi bela negara dalam rangka pembinaan ketahanan nasional yang dikirim ke Presiden RKBN = Jumlah rancangan kebijakan dan strategi aksi bela negara yang dikirim ke Presiden</p>

	RBN = jumlah rancangan kebijakan bela negara yang dihasilkan yang dihasilkan
Target	85
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Kedeputian Pengembangan
Penyedia Data	Kedeputian Pengembangan
Penanggungjawab	Sesjen Wantannas

MANUAL IKU ESELON I SEKJEN WANTANNAS

PERSPEKTIF: CUSTOMER

MANUAL IKU DEPUTI PENGKAJIAN DAN PENGINDERAAN

SP1: Terumuskannya rancangan kebijakan dan strategi nasional, regional, dan internasional yang tangguh dan dinamis

Indikator Kinerja Utama	
IKP1. Persentase rancangan kebijakan dan strategi nasional, regional, dan internasional yang disiapkan untuk bahan prasidang	
Definisi	<p>Rancangan kebijakan dan strategi nasional, regional, dan internasional merupakan hasil dari telaahan strategis (siklis dan dinamis) berkaitan dengan permasalahan nasional, regional dan Internasional yang krusial mendesak yang disusun dalam bentuk analisis, pertimbangan, dan rekomendasi pemecahan masalah yang dapat digunakan oleh Ketua Dewan dalam menentukan kebijakan.</p> <p>Kajian siklis adalah suatu telaahan yang diselenggarakan secara berlanjut sesuai periode waktu tertentu sebagai sumbangan bagi Pemerintah dalam menyusun rencana kerja jangka pendek dan jangka sedang, dalam dalam hal ini Deputi Pengkajian dan Penginderaan menyusun kajian siklis dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kirstranas (Perkiraan Strategis Nasional): Perkiraan kondisi kehidupan nasional pada satu tahun berikutnya dan pengaruhnya terhadap kondisi keamanan nasional serta isu-isu strategis yang perlu diperhatikan.• Apstranas (Apresiasi Strategis Nasional): Telaahan tentang prioritas sasaran, arah kebijakan dan perkiraan risiko pembangunan pada satu tahun berikut, termasuk antisipasi mengurangi derajat risiko disusun berdasarkan isu strategis global, regional dan nasional.• Telstranas (Telaahan Strategis Nasional): Telaahan tentang perkiraan kondisi kehidupan nasional pada lima tahun ke depan, serta pengaruhnya terhadap kondisi keamanan nasional serta isu strategis yang perlu diperhatikan. <p>Kajian Dinamis: Diselenggarakan berdasarkan peristiwa/kejadian dan situasi/kondisi (isu nasional kritis mendesak) tertentu yang berpengaruh terhadap stabilitas keamanan nasional.</p>

Formula perhitungan kinerja	<p>Jumlah rumusan kebijakan dan strategi ketahanan nasional, regional dan internasional (Naskah N-2) yang akan dihasilkan pada rapat uji materi forum II dibagi Naskah N-1 (siklis dan dinamis) kedeputan jandra yang di jadikan bahan uji materi forum II dikalikan seratus persen</p> $\text{PRKN-2} = \frac{\sum \text{N-2}}{\sum \text{RN-2}} \times 100 \%$ <p>PRKN-2 = Persentase rancangan kebijakan dan strategi nasional, regional, dan internasional yang disiapkan untuk bahan prasidang N-2 = rumusan kebijakan dan strategi ketahanan nasional, regional dan internasional (Naskah N-2) yang akan dihasilkan pada rapat uji materi forum II RN-2 = Naskah N-1 (siklis dan dinamis) kedeputan jandra yang di jadikan bahan uji materi forum II</p>
Target	80
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Kedeputan Pengkajian dan Penginderaan
Penyedia Data	Kedeputan Pengkajian dan Penginderaan
Penanggungjawab	Deputi Pengkajian dan Penginderaan

Indikator Kinerja Utama

IKP2. Persentase saran tindak hasil penginderaan nasional, regional, dan internasional yang dikirim ke Presiden

Definisi	<p>Saran tindak yang dimaksud adalah dalam lingkup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan Cepat 2. Round Table Discussion 3. Forum General Discussion
-----------------	--

Formula perhitungan kinerja	<p>Jumlah rumusan saran tindak kebijakan dan strategi nasional hasil penginderaan nasional, regional, dan internasional di Kedeputan Jiandra yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden dibagi dengan jumlah saran tindak di kedeputan jiandra yang dihasilkan dikali seratus persen</p> $\text{PSTJ} = \frac{\sum \text{RSTJ}}{\sum \text{STJ}} \times 100 \%$ <p>PSTJ = Persentase saran tindak hasil penginderaan nasional, regional, dan internasional yang dikirim ke Presiden RSTJ = Jumlah rumusan saran tindak kebijakan dan strategi nasional hasil penginderaan nasional, regional, dan internasional di Kedeputan Jiandra yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden STJ = Jumlah saran tindak di Kedeputan Jiandra yang dihasilkan</p>
Target	80
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Kedeputan Pengkajian dan Penginderaan
Penyedia Data	Kedeputan Pengkajian dan Penginderaan
Penanggungjawab	Deputi Pengkajian dan Penginderaan

Indikator Kinerja Utama

IKP3. Persentase kajian kerjasama bidang lingkungan strategis yang dikirim ke Presiden

Definisi	<p>Kajian Kerjasama yang dimaksud adalah dalam lingkup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian Daerah (kajida) : kajian yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan aparatur, pakar, badan dan lembaga swadaya masyarakat daerah untuk mengatasi potensi permasalahan daerah. 2. Kajian Strategis Luar Negeri (kajilu) : Kunjungan kerja ke luar negeri dalam rangka studi banding untuk pengembangan organisasi serta mencari potensi permasalahan atau hal lain yang dapat mempengaruhi keamanan nasional, regional dan internasional. 3. Semiloka : Membahas suatu masalah spesifik untuk mendapatkan informasi, sumbangan pemikiran, dan masukan lainnya yang menekankan pertukaran informasi untuk mendapat kesimpulan dan saran tindak tertentu.
-----------------	--

Formula perhitungan kinerja	<p>Jumlah kajian kerjasama di Kedepatian Jiandra yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden dibagi dengan jumlah kajian kerjasama di kedepatian jiandra yang dihasilkan dikali seratus persen</p> $PKKJ = \frac{\sum RKKJ}{\sum KKJ} \times 100 \%$ <p>PKKJ = Persentase kajian kerjasama bidang lingkungan strategis yang dikirim ke Presiden RKKJ = Jumlah kajian kerjasama di Kedepatian Jiandra yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden KKJ = Jumlah kajian kerjasama di kedepatian jiandra yang dihasilkan</p>
Target	85
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Kedepatian Pengkajian dan Penginderaan
Penyedia Data	Kedepatian Pengkajian dan Penginderaan
Penanggungjawab	Deputi Pengkajian dan Penginderaan

MANUAL IKU DEPUTI SISTEM NASIONAL

SP2: Terumuskannya rancangan Kebijakan sistem nasional yang tangguh dan dinamis

Indikator Kinerja Utama	
IKP1. Persentase rancangan kebijakan sistem nasional yang disiapkan untuk bahan prasidang	
Definisi	<p>Rancangan kebijakan dan strategi nasional merupakan hasil dari telaahan strategis (dinamis) berkaitan dengan permasalahan sistem nasional yang krusial mendesak yang disusun dalam bentuk analisis, pertimbangan, dan rekomendasi pemecahan masalah yang dapat digunakan oleh Ketua Dewan dalam menentukan kebijakan.</p> <p>Kajian Dinamis: Diselenggarakan berdasarkan peristiwa/kejadian dan situasi/kondisi (isu nasional kritis mendesak) tertentu yang berpengaruh terhadap stabilitas keamanan nasional.</p>
Formula perhitungan kinerja	<p>Jumlah rumusan kebijakan sistem nasional (Naskah N-2) yang dihasilkan pada rapat uji materi froum II dibagi Naskah N-1 (dinamis) kedeputian sisnas yang di jadikan bahan uji materi froum II dikalikan seratus persen</p> $\text{PRKN-2} = \frac{\sum \text{N-2}}{\sum \text{RN-2}} \times 100 \%$ <p>PRKN-2 = Persentase rancangan kebijakan sistem nasional yang disiapkan untuk bahan prasidang N-2 = Jumlah rumusan kebijakan sistem nasional (Naskah N-2) yang dihasilkan pada rapat uji materi froum II RN-2 = Naskah N-1 (dinamis) kedeputian sisnas yang di jadikan bahan uji materi froum II</p>
Target	80
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Kedeputian Sistem Nasional
Penyedia Data	Kedeputian Sistem Nasional
Penanggungjawab	Deputi Sistem Nasional

Indikator Kinerja Utama	
IKP2. Persentase saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden	
Definisi	Saran tindak yang dimaksud adalah dalam lingkup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan Cepat 2. Round Table Discussion 3. Forum General Discussion
Formulasi perhitungan kinerja	<p>Jumlah rumusan saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional di Kedepatian Sisnas yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden dibagi dengan jumlah saran tindak di Kedepatian Sisnas yang dihasilkan dikali seratus persen</p> $\text{PSTS} = \frac{\sum \text{RSTS}}{\sum \text{STS}} \times 100 \%$ <p>PSTS = Persentase saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden RSTS = Jumlah rumusan saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional di Kedepatian Sisnas yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden STS = jumlah saran tindak pemantauan kehidupan nasional di Kedepatian Sisnas yang dihasilkan</p>
Target	80
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Kedepatian Sistem Nasional
Penyedia Data	Kedepatian Sistem Nasional
Penanggungjawab	Deputi Sistem Nasional

Indikator Kinerja Utama	
IKP3. Persentase kajian kerjasama bidang sistem nasional yang dikirim ke Presiden	
Definisi	<p>Kajian Kerjasama yang dimaksud adalah dalam lingkup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian Daerah (kajida) : kajian yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan aparat, pakar, badan dan lembaga swadaya masyarakat daerah untuk mengatasi potensi permasalahan daerah. 2. Kajian Strategis Luar Negeri (kajilu) : Kunjungan kerja ke luar negeri dalam rangka studi banding untuk pengembangan organisasi serta mencari potensi permasalahan atau hal lain yang dapat mempengaruhi keamanan nasional, regional dan internasional.

	3. Semiloka : Membahas suatu masalah spesifik untuk mendapatkan informasi, sumbangan pemikiran, dan masukan lainnya yang menekankan pertukaran informasi untuk mendapat kesimpulan dan saran tindak tertentu.
Formula perhitungan kinerja	<p>Jumlah kajian kerjasama di Kedepatian Sisnas yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden dibagi dengan jumlah kajian kerjasama di Kedepatian Sisnas yang dihasilkan dikali seratus persen</p> $\text{PKKS} = \frac{\sum \text{RKKS}}{\sum \text{KKS}} \times 100 \%$ <p>PKKS = Persentase kajian kerjasama bidang sistem nasional yang dikirim ke Presiden RKKS = Jumlah kajian kerjasama di Kedepatian Sisnas yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden KKS = Jumlah kajian kerjasama di Kedepatian Sisnas yang dihasilkan</p>
Target	85
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Kedepatian Sistem Nasional
Penyedia Data	Kedepatian Sistem Nasional
Penanggungjawab	Deputi Sistem Nasional

MANUAL IKU DEPUTI POLITIK DAN STRATEGI

SP3: Terumuskannya rancangan kebijakan politik, strategi nasional, dan rencana kontinjensi yang Tangguh dan dinamis

Indikator Kinerja Utama	
IKP1. Persentase rancangan kebijakan politik strategi nasional dan rencana kontinjensi yang disiapkan untuk bahan prasidang	
Definisi	<p>Rancangan kebijakan Politik dan strategi nasional merupakan hasil dari telaahan strategis (siklis dan dinamis) berkaitan dengan permasalahan politik strategi nasional dan rencana kontinjensi yang krusial mendesak yang disusun dalam bentuk analisis, pertimbangan, dan rekomendasi pemecahan masalah yang dapat digunakan oleh Ketua Dewan dalam menentukan kebijakan.</p> <p>Kajian siklis adalah suatu telaahan yang diselenggarakan secara berlanjut sesuai periode waktu tertentu sebagai sumbangan bagi Pemerintah dalam menyusun rencana kerja jangka pendek dan jangka sedang, dalam dalam hal ini Deputi Politik dan Strategi menyusun kajian siklis dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategis Nasional (Stranas): Telaahan tentang kecenderungan lingkungan strategis, peluang dan kendala, prioritas sasaran, arah kebijakan dan perkiraan risiko pembangunan pada lima tahun yang akan datang. • Rencana Kontinjensi Nasional (Renkonnas): Telaahan tentang rencana kontinjensi menghadapi risiko pembangunan nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara. <p>Kajian Dinamis: Diselenggarakan berdasarkan peristiwa/kejadian dan situasi/kondisi (isu nasional kritis mendesak) tertentu yang berpengaruh terhadap stabilitas keamanan nasional.</p>
Formula perhitungan kinerja	<p>Jumlah rumusan kebijakan politik dan strategi (Naskah N-2) yang akan dihasilkan pada rapat uji materi froum II dibagi Naskah N-1 (siklis dan dinamis) Kedeputian Polstra yang di jadikan bahan uji materi froum II dikalikan seratus persen</p> $\text{PRKN-2} = \frac{\sum \text{N-2}}{\sum \text{RN-2}} \times 100 \%$ <p>PRKN-2 = Persentase rancangan kebijakan politik strategi nasional dan rencana kontinjensi yang disiapkan untuk bahan prasidang N-2 = Jumlah rumusan kebijakan politik dan strategi (Naskah N-2) yang akan dihasilkan pada rapat uji materi froum II RN-2 = Naskah N-1 (siklis dan dinamis) Kedeputian Polstra yang di jadikan bahan uji materi froum II</p>
Target	80

Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Kedeputian Politik dan Strategi
Penyedia Data	Kedeputian Politik dan Strategi
Penanggungjawab	Deputi Politik dan Strategi

Indikator Kinerja Utama

IKP2. Persentase saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden

Definisi	Saran tindak yang dimaksud adalah dalam lingkup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan Cepat 2. Round Table Discussion 3. Forum General Discussion
Formula perhitungan kinerja	<p>Jumlah rumusan saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional di Kedeputian Polstra yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden dibagi dengan jumlah saran tindak di Kedeputian Polstra yang dihasilkan dikali seratus persen</p> $\text{PSTP} = \frac{\sum \text{RSTP}}{\sum \text{STP}} \times 100 \%$ <p>PSTP = Persentase saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden RSTP = Jumlah rumusan saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional di Kedeputian Polstra yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden STP = jumlah saran tindak pemantauan kehidupan nasional di Kedeputian Polstra yang dihasilkan</p>
Target	80
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Kedeputian Politik dan Strategi
Penyedia Data	Kedeputian Politik dan Strategi
Penanggungjawab	Deputi Politik dan Strategi

Indikator Kinerja Utama

IKP3. Persentase perumusan perkiraan batas toleransi risiko pembangunan yang disiapkan sebagai bahan masukan pengambilan keputusan

Definisi	Saran tindak yang dimaksud adalah dalam lingkup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan Cepat 2. Round Table Discussion 3. Forum General Discussion
Formula perhitungan kinerja	<p>Jumlah rumusan saran tindak perkiraan batas toleransi risiko pembangunan di Kedeputian Polstra yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden dibagi dengan jumlah saran tindak perkiraan batas toleransi risiko pembangunan di Kedeputian Polstra yang dihasilkan dikali seratus persen</p> $\text{PSTP} = \frac{\sum \text{RSTP}}{\sum \text{STP}} \times 100 \%$ <p>PSTP = Persentase perumusan perkiraan batas toleransi risiko pembangunan yang disiapkan sebagai bahan masukan pengambilan keputusan RSTP = Jumlah rumusan saran tindak perkiraan batas toleransi risiko pembangunan di Kedeputian Polstra yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden STP = jumlah saran tindak perkiraan batas toleransi risiko pembangunan di Kedeputian Polstra yang dihasilkan</p>
Target	80
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Kedeputian Politik dan Strategi
Penyedia Data	Kedeputian Politik dan Strategi
Penanggungjawab	Deputi Politik dan Strategi

Indikator Kinerja Utama

IKP4. Persentase kajian kerjasama bidang politik dan strategi yang dikirim ke Presiden

Definisi	<p>Kajian Kerjasama yang dimaksud adalah dalam lingkup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian Daerah (kajida) : kajian yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan aparatur, pakar, badan dan lembaga swadaya masyarakat daerah untuk mengatasi potensi permasalahan daerah. 2. Kajian Strategis Luar Negeri (kajilu) : Kunjungan kerja ke luar negeri dalam rangka studi banding untuk pengembangan organisasi
-----------------	---

	<p>serta mencari potensi permasalahan atau hal lain yang dapat mempengaruhi keamanan nasional, regional dan internasional.</p> <p>3. Semiloka : Membahas suatu masalah spesifik untuk mendapatkan informasi, sumbangan pemikiran, dan masukan lainnya yang menekankan pertukaran informasi untuk mendapat kesimpulan dan saran tindak tertentu.</p>
Formula perhitungan kinerja	<p>Jumlah kajian kerjasama di Kedeputian Polstra yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden dibagi dengan jumlah kajian kerjasama di Kedeputian Polstra yang dihasilkan dikali seratus persen</p> $\text{PKKJ} = \frac{\sum \text{RKKJ}}{\sum \text{KKJ}} \times 100 \%$ <p>PKKJ = Persentase kajian kerjasama bidang politik dan strategi yang dikirim ke Presiden RKKJ = Jumlah kajian kerjasama di Kedeputian Polstra yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden KKJ = Jumlah kajian kerjasama di Kedeputian Polstra yang dihasilkan</p>
Target	80
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Kedeputian Politik dan Strategi
Penyedia Data	Kedeputian Politik dan Strategi
Penanggungjawab	Deputi Politik dan Strategi

MANUAL IKU DEPUTI PENGEMBANGAN

SP4: Terumuskannya hasil pengukuran pembangunan nasional dan kondisi kehidupan nasional serta kebijakan mobilisasi sumber kekuatan nasional yang tangguh dan dinamis

Indikator Kinerja Utama	
IKP1. Persentase rancangan kebijakan mobilisasi sumber kekuatan nasional yang disiapkan untuk bahan prasidang	
Definisi	Rancangan kebijakan dan strategi nasional merupakan hasil dari telaahan strategis (dinamis) berkaitan dengan permasalahan sistem nasional yang krusial mendesak yang disusun dalam bentuk analisis, pertimbangan, dan rekomendasi pemecahan masalah yang dapat digunakan oleh Ketua Dewan dalam menentukan kebijakan. Kajian Dinamis: Diselenggarakan berdasarkan peristiwa/kejadian dan situasi/kondisi (isu nasional kritis mendesak) tertentu yang berpengaruh terhadap stabilitas keamanan nasional.
Formula perhitungan kinerja	Jumlah rumusan kebijakan mobilisasi sumber kekuatan nasional (Naskah N-2) yang dihasilkan pada rapat uji materi forum II dibagi Naskah N-1 (dinamis) ke deputian pengembangan yang di jadikan bahan uji materi forum II dikalikan seratus persen $\text{PRKN-2} = \frac{\sum \text{N-2}}{\sum \text{RN-2}} \times 100 \%$ <p>PRKN-2 = Persentase rancangan kebijakan pengembangan yang disiapkan untuk bahan prasidang N-2 = Jumlah rumusan kebijakan mobilisasi sumber kekuatan nasional (Naskah N-2) yang dihasilkan pada rapat uji materi forum II RN-2 = Naskah N-1 (dinamis) ke deputian pengembangan yang di jadikan bahan uji materi forum II</p>
Target	80
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Kedeputian Pengembangan
Penyedia Data	Kedeputian Pengembangan
Penanggungjawab	Deputi Pengembangan

Indikator Kinerja Utama	
IKP2. Persentase saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan penyimpangan pembangunan nasional yang dikirim ke Presiden	
Definisi	Saran tindak yang dimaksud adalah dalam lingkup: 1. Perkiraan Cepat

	<p>2. Round Table Discussion</p> <p>3. Forum General Discussion</p>
<p>Formula perhitungan kinerja</p>	<p>Jumlah rumusan saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan penyimpangan pembangunan nasional di Kedeputian Pengembangan yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden dibagi dengan jumlah saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan penyimpangan pembangunan nasional di Kedeputian Pengembangan yang dihasilkan dikali seratus persen</p> $\text{PSTS} = \frac{\sum \text{RSTS}}{\sum \text{STS}} \times 100 \%$ <p>PSTS = Persentase saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan penyimpangan pembangunan nasional yang dikirim ke Presiden RSTS = Jumlah rumusan saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan penyimpangan pembangunan nasional di Kedeputian Pengembangan yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden STS = jumlah saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan penyimpangan pembangunan nasional di Kedeputian Pengembangan</p>
Target	80
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Kedeputian Pengembangan
Penyedia Data	Kedeputian Pengembangan
Penanggungjawab	Deputi Pengembangan

Indikator Kinerja Utama

IKP3. Persentase saran tindak hasil pengukuran kondisi kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden

Definisi	<p>Saran tindak yang dimaksud adalah dalam lingkup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan Cepat 2. Round Table Discussion 3. Forum General Discussion
-----------------	--

Formula perhitungan kinerja	<p>Jumlah rumusan saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional di Kedepatian Pengembangan yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden dibagi dengan jumlah saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional di Kedepatian Pengembangan yang dihasilkan dikali seratus persen</p> $\text{PSTP} = \frac{\sum \text{RSTP}}{\sum \text{STP}} \times 100 \%$ <p>PSTP = Persentase saran tindak hasil pengukuran kondisi kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden RSTP = Jumlah rumusan saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional di Kedepatian Pengembangan yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden STP = jumlah saran tindak hasil pengukuran kondisi pemantauan kehidupan nasional di Kedepatian Pengembangan yang dihasilkan</p>
Target	80
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Kedepatian Pengembangan
Penyedia Data	Kedepatian Pengembangan
Penanggungjawab	Deputi Pengembangan
Keterangan lainnya	-

Indikator Kinerja Utama	
IKP4. Persentase kajian kerjasama bidang pengembangan ketahanan yang dikirim ke Presiden	
Definisi	<p>Kajian Kerjasama yang dimaksud adalah dalam lingkup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian Daerah (kajida) : kajian yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan aparatur, pakar, badan dan lembaga swadaya masyarakat daerah untuk mengatasi potensi permasalahan daerah. 2. Kajian Strategis Luar Negeri (kajilu) : Kunjungan kerja ke luar negeri dalam rangka studi banding untuk pengembangan organisasi serta mencari potensi permasalahan atau hal lain yang dapat mempengaruhi keamanan nasional, regional dan internasional. 3. Semiloka : Membahas suatu masalah spesifik untuk mendapatkan informasi, sumbangan pemikiran, dan masukan lainnya yang menekankan pertukaran informasi untuk mendapat kesimpulan dan saran tindak tertentu.

Formula perhitungan kinerja	<p>Jumlah kajian kerjasama di Kedeputan Pengembangan yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden dibagi dengan jumlah kajian kerjasama di Kedeputan Pengembangan yang dihasilkan dikali seratus persen</p> $\text{PKKS} = \frac{\sum \text{RKKS}}{\sum \text{KKS}} \times 100 \%$ <p>PKKS = Persentase kajian kerjasama bidang pengembangan ketahanan yang dikirim ke Presiden RKKS = Jumlah kajian kerjasama di Kedeputan Pengembangan yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden KKS = Jumlah kajian kerjasama di Kedeputan Pengembangan yang dihasilkan</p>
Target	85
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Kedeputan Pengembangan
Penyedia Data	Kedeputan Pengembangan
Penanggungjawab	Deputi Pengembangan

Indikator Kinerja Utama

IKP5. Persentase rancangan kebijakan aksi bela negara untuk pembinaan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang disiapkan

Definisi

Bela negara sesuai dengan RPJM 2020-2024 masuk kedalam Prioritas Nasional (PN) : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, telah ditentukan Program Prioritas (PP) 1 : REVOLUSI MENTAL DAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA UNTUK MEMPERKUKUH KETAHANAN BUDAYA BANGSA DAN MEMBENTUK MENTALITAS BANGSA YANG MAJU, MODERN, DAN BERKARAKTER, Kegiatan Prioritas (KP) 6 :Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme, Proyek Prioritas (Pro PN) : Pembinaan ideologi Pancasila, penguatan pendidikan kewargaan, nilai-nilai kebangsaan dan bela negara. dan Peraturan Presiden Tentang kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Tahun 2020-2024 Wantannas diamanatkan untuk untuk melaksanakan kegiatan Bela negara untuk tahun 2020-2024 melalui Aksi nasional bela negara.

Formula perhitungan kinerja	<p>Jumlah Rancangan Kebijakan Bela Negara di Kedepatian Pengembangan yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden dibagi dengan jumlah kajian Bela Negara di Kedepatian Pengembangan yang dihasilkan dikali seratus persen</p> $PKBN = \frac{\sum RKBN}{\sum KBN} \times 100 \%$ <p>PKBN = Persentase rancangan kebijakan aksi bela negara untuk peminanaan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang disiapkan RKBN = Jumlah Rancangan Kebijakan Bela Negara di Kedepatian Pengembangan yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden KBN = jumlah kajian Bela Negara di Kedepatian Pengembangan yang dihasilkan</p>
Target	85
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Kedepatian Pengembangan
Penyedia Data	Kedepatian Pengembangan
Penanggungjawab	Deputi Pengembangan

MANUAL IKU STAFF AHLI

SP5: Meningkatnya kehandalan telaahan, saran dan pertimbangan serta rekomendasi yang tangguh dan dinamis

Indikator Kinerja Utama	
IKP3. Jumlah telaahan, saran dan pertimbangan serta rekomendasi yang dihasilkan	
Definisi	Telaahan, saran dan pertimbangan serta rekomendasi adalah dalam lingkup: 1. Perkiraan Cepat 2. Round Table Discussion 3. Forum General Discussion
Formula perhitungan kinerja	Jumlah telaahan staff bidang keahlian tertentu yang direkomendasikan kepada Sesjen untuk dikirim ke Presiden dibagi dengan jumlah telaahan staff bidang keahlian tertentu yang dihasilkan dikali seratus persen $\text{JTSR} = \frac{\sum \text{JTS}}{\sum \text{TS}} \times 100 \%$ JTS = Jumlah telaahan, saran dan pertimbangan serta rekomendasi yang dihasilkan JTS = Jumlah telaahan staff bidang keahlian tertentu yang direkomendasikan kepada Sesjen untuk dikirim ke Presiden TS = jumlah telaahan staff bidang keahlian tertentu yang dihasilkan
Target	85
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Staff Ahli
Penyedia Data	Staff Ahli
Penanggungjawab	Staff Ahli

PERSPEKTIF: INTERNAL PROCESS

MANUAL IKU DUKUNGAN MANAJEMEN

SS1: Terwujudnya Wantannas yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi

Indikator Kinerja Utama	
IKU1. Indeks Reformasi Birokrasi	
Definisi	Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: (a) kelembagaan atau organisasi; (b) ketatalaksanaan; dan (c) sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pengukuran penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN & RB menggunakan penilaian Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil. Masing-masing komponen mempunyai nilai bobot. Adapun Komponen Pengungkit mencakup Area : a. Manajemen Perubahan (Bobot 5) b. Penataan Peraturan Peundang-undangan (Bobot 5) c. Penataan dan Penguatan Organisasi (Bobot 6) d. Penataan Tata Laksana (Bobot 5) e. Penataan Sistem Manajemen SDM (Bobot 15) f. Penguatan Akuntabilitas (Bobot 6) g. Penguatan Pengawasan (Bobot 12) h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Bobot 6)
Formula perhitungan kinerja	Akan dilaksanakan oleh Kemenpan RB dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim Menpan RB.
Target	BB
Satuan pengukuran	Peringkat
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Hasil Penilaian lembar kerja evaluasi Kemenpan dan RB
Penyedia Data	Semua Kedeputian dan Semua Kebioaran
Penanggungjawab	Sesjen Wantannas
Keterangan lainnya	-

Indikator Kinerja Utama	
IKU2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	
Definisi	Evaluasi AKIP dilakukan dan dinilai oleh Kemenpan dan RB dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas atas outcome terhadap penggunaan anggaran. Penilaian dilakukan terhadap 5 komponen: Perencanaan Kinerja (35%), Pengukuran Kinerja (20%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Internal (10%), dan Capaian Kinerja (20%). Nilai akhir penjumlahan komponen menjadi nilai tingkat akuntabilitas instansi yang dinilai: AA (>85-100) adalah memuaskan A (>75-85) adalah sangat baik B (>65-75) adalah baik CC (>50-65) adalah Cukup (memadai) C (>30-50) adalah kurang D (0-30) adalah sangat kurang
Formula perhitungan kinerja	Akan dilaksanakan oleh Kemenpan RB dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim Menpan RB.
Target	75
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Hasil Penilaian lembar kerja evaluasi Kemenpan dan RB
Penyedia Data	Biro POK dan Biro PSP
Penanggungjawab	Sesjen Wantannas
Keterangan lainnya	-

Indikator Kinerja Utama	
IKU3. Opini Badan Pemeriksa Keuangan	
Definisi	Status Opini atas Laporan Keuangan hanya dikeluarkan oleh BPK yang melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan sekali dalam setahun. Yang dilakukan oleh APIP dalam rangka menuju opini WTP adalah melaksanakan seluruh kegiatan pengawasan internal berupa: Audit, Reviu, Monitoring, dan Evaluasi serta Konsultasi. Fokus kegiatan pengawasan adalah pada bidang-bidang yang sangat potensial dapat mempengaruhi Kinerja dan Opini, ataupun potensial menimbulkan kerugian keuangan negara yang signifikan. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan lebih diarahkan pada kegiatan pengawasan yang bersifat preventif (seperti probity audit) dan pendampingan/konsultasi.
Formula perhitungan kinerja	Opini atas laporan keuangan yang dikeluarkan oleh BPK

Target	WTP
Satuan pengukuran	Peringkat
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Hasil Penilaian lembar kerja evaluasi Kemenpan dan RB
Penyedia Data	Biro POK
Penanggungjawab	Sesjen Wantannas

Indikator Kinerja Utama

IKU4. Jumlah penyelenggaraan Sidang Dewan

Definisi	Sidang Dewan Ketahanan Nasional merupakan forum/rapat/pertemuan tertinggi Wantannas yang bertugas melakukan pembahasan dan penetapan kebijakan nasional berkaitan dengan isu-isu keamanan nasional. Tahapan: persiapan sidang (inisiasi dan uji materi dalam forum deputi/uji pertama, forum sesjen/uji kedua dan forum pra sidang dewan/uji ketiga), pelaksanaan sidang dan pasca sidang.
Formula perhitungan kinerja	<p>Rumusan kebijakan yang disiapkan (untuk bahan prasidang/sidang dewan) dibagi dengan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dikalikan seratus persen</p> $PRS = \frac{\sum RS}{\sum RH} \times 100 \%$ <p>PRS = persentase rumusan kebijakan yang disiapkan Sesjen Wantannas (untuk bahan prasidang/sidang dewan) RS = rekomnedasi rekomendasi kebijakan yang disiapkan Sesjen (untuk bahan prasidang/sidang dewan) RH = rumusan kebijakan yang di setuju sesjen pada forum uji I/II</p>
Target	2
Satuan pengukuran	Sidang
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Biro PSP
Penyedia Data	Kedeputian
Penanggungjawab	Sesjen Wantannas